

PENINGKATAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN MELALUI OPTIMALISASI PERAN KOMITE MADRASAH

Wiwik Wida Farwati^{1*}

Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Bumigora, Mataram

e-mail: Farwatiwiwik@gmail.com

ABSTRACT

Community involvement in the education sector is facilitated through the organization of Madrasah Committees established by each educational institution. This organization aims to ensure that community aspirations and initiatives are channeled, as well as to create responsibility, community participation, and a transparent, accountable and democratic atmosphere in the implementation of education. To ensure that this goal does not just become a slogan, it is necessary to optimize the role of the Madrasah Committee so that it can make a real contribution to education and improve the quality of education.

Keyword: Mutu layanan Pendidikan, Peran Komite Madrasah

Pendahuluan

Masyarakat adalah sumber daya penting bagi pendidikan di setiap institusi. Hal ini terbukti dari beberapa kasus di mana pendidikan terpaksa berhenti karena kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar dan hanya dimanfaatkan oleh lembaga untuk keuntungan finansial. Lembaga pendidikan seharusnya menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat, karena ini akan meningkatkan partisipasi mereka terhadap sekolah. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang kebutuhan dan kegiatan yang diadakan di sekolah. Dengan pemahaman ini, masyarakat akan terdorong untuk bekerja sama, tidak hanya dalam meningkatkan dan mengembangkan kuantitas tetapi juga dengan tetap berfokus pada kualitas. Konsep dasar hubungan antara sekolah dan masyarakat pada dasarnya berasal dari konsep hubungan publik (public relation). Dalam konteks sekolah, ini disebut hubungan publik sekolah atau hubungan sekolah dengan masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa hubungan antara sekolah dan masyarakat bersifat timbal balik. Di satu sisi, sekolah memberikan kontribusi untuk kepentingan masyarakat dalam keberhasilan pendidikan anak-anak mereka. Di sisi lain, masyarakat memberikan kontribusi berupa saran atau sumbangan material lainnya yang mendukung keberhasilan pelaksanaan pendidikan di sekolah (Ahmadi Rulam, 2010:14). Sebagai konsekuensi dari perluasan makna peran serta masyarakat dalam kebijakan pendidikan, menurut Khaeruddin.

Oleh karena itu, diperlukan suatu wadah untuk menampung dan menyalurkan pemikiran dan gagasan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, yaitu komite sekolah. Komite sekolah atau madrasah adalah badan mandiri yang menampung peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di setiap satuan pendidikan, baik pada tingkat pra-sekolah maupun pendidikan dasar dan menengah. Pembentukan komite sekolah bertujuan untuk menciptakan sebuah organisasi masyarakat yang memiliki komitmen, loyalitas, dan kepedulian terhadap peningkatan mutu sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara unik dan berakar dari budaya, demografi, ekologi, serta berdasarkan nilai-nilai kesepakatan dan kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat (Baharuddin, 2010:248). Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadai peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/UU/2002 tentang dewan pendidikan atau komite sekolah, yaitu pasal 1 ayat 2 bahwa setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan dibentuk dewan sekolah atas prakarsamasyarakat dan pemerintah kabupaten atau kota. Adanya komite sekolah diharapkan dapat membantu sekolah mengatasi berbagai persoalan yang menghambat peningkatan kualitas pendidikan. Fasilitas dan infrastruktur yang tersedia diharapkan mendukung proses pembelajaran yang efektif dan memaksimalkan prestasi belajar siswa. Untuk mewujudkan program

kerja yang efektif, komite sekolah harus dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan sekolah, bukan hanya sebagai organisasi yang dikenal oleh orangtua, siswa, dan masyarakat. Komite sekolah dalam peningkatan mutu sekolah dan hasil belajar sangat diharapkan oleh masyarakat. Untuk mencapai hal ini, kinerja guru yang berperan penting dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter siswa sangat diperlukan (Raberi, Fitria, dan Fitriani, 2020: 3).

Komite sekolah sejatinya menjadi wadah partisipasi para pemangku kepentingan untuk turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya. Hal ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah secara proporsional untuk mewujudkan "Masyarakat Sekolah" yang memiliki loyalitas terhadap peningkatan mutu sekolah (Samsidar, 2018:2). Salah satu wujud aktualisasi konsep Manajemen Berbasis Sekolah adalah dibentuklah suatu badan yang mengganti keberadaan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) yakni Komite Sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Penggantian nama BP3 menjadi Komite Sekolah. Dari konsep tersebut peningkatan mutu harus menyeluruh, fleksibel dan berkesinambungan. Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di antaranya kebijakan pembentukan Komite Sekolah yang akhir-akhir ini menjadi agenda dalam dunia pendidikan di Indonesia. Gagasan manajemen berbasis sekolah perlu dipahami dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama sekolah. Implementasi manajemen berbasis sekolah tidak hanya membawa perubahan dalam kewenangan akademik dan tata kelola sekolah, tetapi juga mengubah pola kebijakan serta orientasi partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan sekolah (Rohiat, 2010:47-55).

Konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan otonomi dan profesionalisme setiap satuan pendidikan. Keberhasilan program MBS dapat diukur dari meningkatnya partisipasi masyarakat, dengan cara mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh komite sekolah di tingkat satuan pendidikan dan dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Komite sekolah dan dewan pendidikan ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya kompleksitas organisasi sekolah sebagai akibat dari penerapan konsep MBS. Namun akhir-akhir ini muncul permasalahan dimana peran komite sekolah tidak selalu andil dalam kegiatan pencapaian mutu pendidikan, terlebih lagi semakin dibebaskannya biaya pendidikan oleh pemerintah yang mana mewajibkan pendidikan 12 tahun, yang menjadikan tidak ada nya kejelasan dari peran komite sekolah itu sendiri, sehingga perlu adanya penempatan ulang terhadap peranan komite sekolah dalam pencapaian mutu Pendidikan. Padahal dalam peran serta fungsi komite sekolah merupakan sebagai penghubung antara sekolah dan orang tua murid agar terjadinya feedback yang baik guna menciptakan mutu pendidikan yang berkualitas. Koordinasi yang dijalankan dalam komite sekolah pun harus tepat sasaran, agar komite sekolah dapat menyalurkan apa saja yang diinginkan wali murid, demi meningkatkan kepuasan pelanggan dan mencapai citra yang baik bagi sekolah tersebut.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan dalam artikel jurnal ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subjek yang berupa individu, organisasi,. Adapun tujuannya adalah untuk menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah yang ada. Sumber data dalam penelitian ini peneliti dapatkan melalui 2 sumber yaitu sumber data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder di peroleh melalui observasi dan juga studi dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Pembentukan Komite Sekolah

Pembentukan Komite MTs Suryabuana Malang menekankan pada dua indikator utama: komitmen dan keahlian. Sebagai wakil pemangku kepentingan pendidikan dan mitra madrasah, komite memerlukan komitmen yang kuat serta kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Komitmen yang baik sangat penting bagi anggota komite untuk memastikan bahwa tugas yang dipercayakan kepada mereka dapat diselesaikan dengan baik, karena tanpa komitmen, tugas tersebut mungkin tidak terselesaikan. Selain komitmen, diperlukan juga anggota komite yang memiliki keahlian agar tugas dapat diselesaikan dengan baik. Kedua indikator ini, komitmen dan keahlian, sangat berkaitan dan sangat diperlukan dalam anggota Komite Madrasah. Mengenai pentingnya kedua indikator ini

dikemukakan oleh Kepala Madrasah berikut ini:

”...kita tidak akan memberikan kewenangan ini kepada yang ahli saja atau orang yang berkomitmen saja. Kita memberikan kewenangan kepada seseorang yang ahli tapi tidak berkomitmen ya tugasnya tidak jalan. Memberikan kewenangan kepada orang yang berkomitmen tanpa keahlian ya tugasnya akan amburadul. Jadi kita cari indikator dua-duanya, yaitu komitmen dan expert.”

Dalam proses pembentukan Komite MTs Suryabuana Malang, di MTs Suryabuana sendiri menjangkau calon ketua dan anggota melalui 2 cara yaitu untuk ketua dalam memilih ketua dan sekretaris Komite Madrasah dilakukan pemilihan langsung oleh audiens selaku stakeholders yang hadir dalam pemilihan itu. Sebelum pemilihan ketua dan sekretaris Komite Madrasah dilakukan, disampaikan terlebih dahulu kepada audiens tentang autobiografi, background pendidikan, komitmen, dan juga visi misinya jika nanti terpilih menjadi pengurus Komite Madrasah. Dari penyampaian hal-hal tersebut, maka audiens bisa menilai dan memilih mana orang-orang yang dianggap mempunyai keahlian sekaligus komitmen yang bagus agar nantinya Komite Madrasah dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Hal ini dipaparkan oleh Kepala Madrasah berikut ini:

”Yang disepakati pada waktu pemilihan pengurus komite madrasah oleh orang tua adalah ketua dan sekretaris serta formatur. Ketua dan sekretaris terpilih oleh audiens dengan melihat visi misi, autobiografi, background pendidikan dan juga komitmen yang mereka jelaskan sebelum pemilihan.”

Sedangkan untuk anggota komite akan dijangkau melalui partisipasi paguyuban orang tua siswa Di MTs Suryabuana ada organisasi perkumpulan wali murid yang disebut dengan Paguyuban Orang tua Siswa (POS). Paguyuban yang menjadi ajang bertemunya orang tua dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan ini bisa potensi dan komitmen yang dimiliki oleh wali murid tersebut dengan melihat keaktifan wali murid tersebut memberikan kritik, saran atau masukan-masukan terhadap madrasah. Keaktifan tersebut bisa dijadikan tolak ukur kemampuan dan komitmen seseorang untuk bisa menjadi anggota komite karena POS ini adalah organisasi sosial murni untuk memajukan madrasah. Dari POS inilah bisa didapatkan bibit-bibit anggota Komite Madrasah yang mempunyai kemampuan/keahlian (expert) dan mempunyai komitmen yang bagus untuk turut berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tujuan pembentukan Komite Madrasah. Pencarian calon anggota komite yang expert dan berkomitmen melalui paguyuban POS ini dikemukakan oleh Kepala Madrasah berikut ini:

”Komitmen yang dimiliki oleh anggota Komite Madrasah itu harus teruji, mereka yang aktif di POS sudah teruji karena paguyuban orang tua kan kegiatan sosial murni.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa proses pembentukan Komite MTs Suryabuana Malang berdasarkan keputusan Kementerian Pendidikan Nasional sedangkan anggota dan kepengurusannya diputuskan melalui musyawarah atau rapat pihak madrasah dengan masyarakat dan wali murid. Dengan demikian pembentukan Komite MTs Suryabuana Malang telah sesuai aturan sehingga dapat diterima semua pihak. Proses pembentukan Komite Madrasah merupakan langkah awal yang krusial dalam menentukan pelaksanaan peran dan fungsi Komite Madrasah. Proses ini didasarkan pada tiga prinsip manajemen modern, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi. Transparansi berarti bahwa pembentukan Komite Madrasah harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas, mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, hingga penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel adalah panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggung jawaban kinerjanya maupun penggunaan dana penelitian. Dilakukan dengan demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dilakukan dengan berkeadilan adalah dengan memperhatikan komposisi pengurus dan perwakilan masyarakat, madrasah atau lainnya secara proporsional dan adil. Jika dipandang perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara. (DEPAG RI, 2003)

Jika proses pembentukan Komite Madrasah tidak mengikuti ketiga prinsip tersebut, maka Komite Madrasah tersebut hanya akan menjadi sebuah entitas formal yang tidak pernah dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Langkah awal dalam membentuk Komite Madrasah adalah membentuk panitia persiapan. Panitia persiapan ini bertugas secara operasional untuk menyusun rencana pembentukan Dewan Pendidikan/Komite Madrasah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama: mengadakan forum sosialisasi. Forum sosialisasi ini sangat penting untuk memberikan pengertian kepada seluruh lapisan masyarakat tentang Komite Madrasah. Forum sosialisasi ini mungkin berupa rapat, bahkan bisa saja dalam konteks yang lebih luas, misalnya melalui penyebaran brosur, pamflet, pengumuman diradio, televisi, surat kabar buletin ataupun melalui situs web resmi lembaga. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar informasi tersebut bisa terdengar dan mendapat respon dari masyarakat. Kedua: Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota. Ketetapan tentang kriteria ini harus telah diketahui dan disepakati bersama, dan berdasarkan kriteria itu maka baru bisa diidentifikasi nama-nama calon yang memenuhi syarat. Ketiga: Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat. Panitia persiapan mendaftarkan semua nama calon yang masuk, kemudian panitia menyeleksi apakah usulan itu memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Keempat: Mengumumkan nama-nama calon yang telah terdaftar kepada masyarakat. Kelima: Kalau tidak ada komplain dari masyarakat, maka langkah berikutnya adalah panitia persiapan menyusun nama-nama calon anggota yang terpilih. Keenam: Pihak birokrasi (Kepala Madrasah) kemudian memfasilitasi untuk mengadakan pemilihan pengurus dan anggota Komite Madrasah. Proses pemilihan pengurus anggota Komite Madrasah harus berlangsung secara demokratis dan transparan. Dalam hal ini, sama sekali tidak boleh ada intervensi dari pihak birokrasi dalam menentukan siapa yang akan menjadi ketua, sekretaris, bendahara atau ketua-ketua bidang dalam struktur organisasi Dewan Pendidikan atau Komite Madrasah. Ketujuh: Setelah diperoleh nama-nama pengurus dan anggota Komite Madrasah melalui cara yang disepakati, maka tahap terakhir adalah menyerahkan nama-nama itu untuk diterbitkan dalam Surat Keputusan oleh Kepala Madrasah. (Sri Renani, 2008:86)

2. Peran Komite dalam meningkatkan pelayanan pendidikan

Dalam menghadapi tantangan global, fokus utamanya adalah menjadi manusia yang berkualitas. Mutu dalam konteks "hasil" merujuk pada pencapaian prestasi, baik itu dalam bentuk prestasi akademik yang tercermin dalam nilai-nilai yang diperoleh oleh peserta didik, prestasi non-akademik yang mencakup berbagai keterampilan, maupun prestasi yang bersifat tidak langsung seperti sikap sopan, kejujuran, disiplin, nilai-nilai hidup yang dipegang teguh, dan motivasi untuk terus maju guna memenuhi harapan masyarakat. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Namun, disayangkan bahwa ungkapan bijak tersebut hingga saat ini masih lebih bersifat slogan dan belum sepenuhnya terwujud sesuai harapan. Tanggung jawab masing-masing pihak masih belum optimal, terutama dalam hal partisipasi masyarakat yang masih dirasakan belum diberdayakan secara memadai. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), pada Pasal 54 disebutkan:

- a. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan,
- b. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.

Pasal 56 Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional disebutkan:

- a. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite madrasah;
- b. Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan ditingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan yang hierarkis;
- c. Komite Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pendidikan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan dalam pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. (Anwar Arifin, 2003)

Berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat tersebut, diperkenalkan konsep Komite Madrasah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, peran Komite Madrasah secara lebih jelas diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah. Baik Dewan Pendidikan maupun Komite Madrasah, keduanya memiliki peran sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator. Peran-peran tersebut tidak

berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan saling melengkapi.

Prestasi yang bersifat tidak dapat dipegang (intangible) juga diajarkan di MTs Suryabuana Malang. Prestasi ini sangat diharapkan oleh orang tua peserta didik, yang kelak akan menggunakan hasil dari proses pendidikan di MTs Suryabuana Malang. Hubungan antara mutu pendidikan dan masyarakat sangatlah erat. MTs Suryabuana Malang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena merupakan bagian integral dari masyarakat, bukan sebagai entitas terpisah. Kemajuan yang dicapai oleh Madrasah berkorelasi dengan kemajuan masyarakat. Masyarakat yang maju disebabkan oleh adanya pendidikan yang berkualitas, dan adanya pendidikan yang berkualitas karena berada dalam masyarakat yang maju. Oleh karena itu, masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.

MTs Suryabuana Malang merupakan lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan harus menjalin hubungan baik dengan masyarakat agar perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat bisa ditangkap oleh pihak Madrasah dan program-program pendidikan di MTs Suryabuana Malang relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga *out comes* pendidikan sesuai dengan kebutuhan para pengguna hasil dari proses pendidikan.

Pentingnya hubungan ini disampaikan oleh salah satu anggota Komite Madrasah MTs Suryabuana Malang, yang juga merupakan pemangku kepentingan karena berasal dari unsur wali peserta didik di Madrasah. Beliau menekankan bahwa perubahan di lingkungan masyarakat terjadi dengan sangat cepat, dan pihak MTs Suryabuana Malang harus mampu menangkapnya agar keinginan dan aspirasi masyarakat sebagai pemilik madrasah dapat terakomodasi dan tersalurkan. Kurikulum-kurikulum di sekolah dianggap sebagai hal yang statis, sementara dunia luar berubah dengan cepat. Untuk mencegah peserta didik tertinggal, penting bagi sekolah untuk menjaga hubungan dengan masyarakat sehingga perubahan-perubahan di lingkungan masyarakat dapat dipertimbangkan dan disesuaikan dengan program-program yang ada di MTs Suryabuana Malang. Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa MTs Suryabuana Malang, yang seharusnya mempersiapkan kader-kader generasi yang siap menghadapi era globalisasi, tidak mengalami ketertinggalan..

Untuk meningkatkan kualitas dalam manajemen, kurikulum, dan program-program lainnya, MTs Suryabuana Malang menjalankan program kerjasama dengan Madrasah-madrasah lain di Kota Malang. Selain itu, MTs Suryabuana Malang juga aktif dalam menggalang persahabatan. Dalam menjaga hubungan dengan masyarakat, terdapat wadah khusus yang telah diakui oleh pemerintah untuk membantu penyelenggaraan pendidikan di madrasah, yaitu Komite Madrasah pada setiap satuan pendidikan

Komite Madrasah, sebagai mitra kerja madrasah, adalah organisasi yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah dan peningkatan mutu pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan ini memungkinkan akomodasi berbagai pandangan, aspirasi, dan potensi masyarakat, sambil juga memastikan terwujudnya prinsip demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan

Kepala MTs Suryabuana Malang menjelaskan bahwa Komite MTs Suryabuana Malang adalah mitra kerja mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasah. Komite tersebut juga merupakan organisasi yang mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di MTs Suryabuana Malang. Partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan ini memungkinkan penampungan berbagai pandangan, aspirasi, dan potensi masyarakat, sambil juga memastikan terwujudnya prinsip demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan

Jika proses pembentukan Komite MTs Suryabuana Malang tidak mengikuti ketiga prinsip tersebut, maka Komite tersebut kemungkinan hanya akan menjadi sebuah entitas formal yang terbentuk tanpa maksud yang jelas, dan mungkin tidak akan dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Namun, jika ketiga prinsip tersebut telah diterapkan dan Komite MTs Suryabuana Malang telah menjalankan perannya dengan baik, maka dapat diasumsikan bahwa Komite tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja sistem pendidikan yang ada. Ini menandakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud, sehingga membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pendidikan secara keseluruhan.

Di MTs Suryabuana Malang ini pelaksanaan ketiga prinsip tersebut sudah terlaksana dengan baik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada paparan data hasil wawancara di atas. Hal ini terbukti dengan dilaksanakannya pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh

panitia persiapan, adanya kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan yang transparan.

Kepala MTs Suryabuana Malang menjelaskan: Agar prinsip akuntabilitas dapat tercipta, maka setelah proses pembentukan Komite MTs Suryabuana Malang selesai maka kemudian dibuat laporan mengenai kegiatan dan penggunaan dana tersebut. Selain itu dalam proses pemilihan anggota dan pengurus komite Madrasah dilakukan dengan musyawarah dan mufakat sehingga prinsip pembentukan Komite Madrasah yang demokratis dapat diwujudkan.

Terkait permasalahan peran Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Suryabuana Malang, berdasarkan hasil penelitian dilapangan maka dapat penulis simpulkan ke dalam 4 peran utama dan keempat peran tersebut bukan peran yang berjalan sendirisendirit tetapi merupakan suatu yang saling berkaitan dan berkesinambungan antara. Adapun keempat peran yang dijalankan oleh Komite MTs Suryabuana Malang adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Pertimbangan

Komite Madrasah, sebagai mitra madrasah, memiliki peran penting sebagai pemberi pertimbangan dalam setiap rencana program dan kebijakan yang akan digunakan oleh madrasah untuk memajukan dirinya. Secara formal, Komite Madrasah difungsikan sebagai pengambil keputusan bersama antara madrasah dan masyarakat dalam hal perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kerja madrasah. Hubungan antara Komite Madrasah dan madrasah adalah kemitraan yang memiliki otonomi masing-masing namun bersifat koordinatif.

Sebelum Kepala Madrasah mengambil keputusan, semua rencana kebijakan dan program yang berkaitan dengan pendidikan seharusnya dibahas atau dikonsultasikan dengan Komite Madrasah. Pemberian pertimbangan oleh Komite Madrasah sangatlah penting karena mereka mewakili masyarakat sebagai mitra madrasah dalam membangun masa depan madrasah tersebut.

Komite MTs Suryabuana Malang telah berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan berbagai pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil, seperti kurikulum, visi misi madrasah, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM), sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan profesionalitas pendidik, peningkatan kesejahteraan pendidik, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan pentingnya peran Komite Madrasah dalam pengambilan keputusan madrasah untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.

2. Pendukung

Komite Madrasah memiliki peran kunci sebagai pendukung madrasah dalam hal dana, pemikiran, dan tenaga untuk memastikan program-program pendidikan berjalan dengan baik sesuai visi-misi yang ditetapkan. Dukungan dari Komite Madrasah, sebagai perwakilan masyarakat dan stakeholders, sangat penting agar madrasah dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dukungan dana yang diberikan oleh Komite MTs Suryabuana Malang tidak hanya berupa sumbangan langsung dalam bentuk uang, tetapi lebih pada bagaimana mereka dapat membantu madrasah dalam memperoleh dana untuk pengembangan. Contohnya, Komite berusaha menjalin kerjasama dengan perusahaan atau instansi lain untuk mendapatkan dana pembangunan, kegiatan, dan lain sebagainya. Dana Komite Madrasah tidak hanya berasal dari iuran peserta didik, tetapi juga dari sumbangan masyarakat, donasi komite, dan sumber lainnya.

Komite MTs Suryabuana Malang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk, baik dari segi dana, pemikiran, maupun tenaga, untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan pendidikan di madrasah tersebut. Dukungan tersebut tidak hanya terbatas pada sumbangan uang, melainkan juga berupa upaya untuk mendapatkan dana atau keringanan pembayaran. Peran pendukung ini juga didukung oleh beragam profesi yang dimiliki oleh anggota Komite MTs Suryabuana Malang serta bantuan dukungan dari masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Wujud peran komite sekolah sebagai badan pendukung (supporting Agency) yaitu baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam hal finansial, komite sekolah berperan mencari alternatif sumber pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah. sebagaimana disebutkan dalam KEMENDIKNAS Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah bahwa fungsi komite sekolah adalah melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan mendorong orang

tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

Komite sekolah memiliki peran penting dalam pengelolaan anggaran pendidikan, di mana mereka bekerja sama dengan pengelola sekolah untuk mendukung pengelolaan pendidikan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam pengalokasian anggaran antara berbagai sekolah. Hal ini sesuai dengan pandangan Misbah yang menyatakan bahwa dalam era otonomi pendidikan, di mana otonomi sekolah menjadi fokus utama, sekolah menjadi bagian yang sangat penting dalam masyarakat sehingga masyarakat memiliki kepedulian dan rasa memiliki terhadap sekolah.

Lebih lanjut, Ditjen Dikdasmen Depdiknas (2007) menunjukkan bahwa peran komite sebagai badan pendukung memiliki indikator dalam pengelolaan anggaran, termasuk memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah, menggerakkan dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah, mengkoordinasikan dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah, dan mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah. Ini menunjukkan bahwa komite sekolah memainkan peran strategis dalam memastikan pengelolaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas sekolah serta aspirasi masyarakat yang mereka wakili.

Berdasarkan paparan diatas dari hasil penelitian pada lembaga tersebut yang dapat dikatakan bahwa peran komite sebagai badan pendukung meliputi ranah finansial, kompetensi guru, dan pengelolaan anggaran. Komite sekolah sebagai pendukung baik yang berwujud finansial/pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, minimal dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengadakan pertemuan secara berkala dengan stakeholder di lingkungan sekolah.
- b. Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/industry untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu.
- c. Memotivasi masyarakat kalangan menengah ke atas untuk berpartisipasi dalam pendidikan, seperti:
- d. Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/industry dalam penyediaan sarana/prasarana serta biaya pendidikan untuk masyarakat tidak mampu.
- e. Ikut memotivasi masyarakat untuk melaksanakan kebijakan pendidikan sekolah.

3. Pengontrol

Komite MTs Suryabuana Malang tidak hanya berperan sebagai pemberi pertimbangan dan dukungan, tetapi juga sebagai pengontrol terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan tersebut. Pengontrolan ini tidak hanya terbatas pada pendanaan, tetapi juga meliputi aspek lainnya. Peran komite sekolah sebagai badan pengontrol dalam implementasi MBS mencakup beberapa hal, antara lain mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah, mengontrol proses pengambilan keputusan oleh kepala sekolah, mengontrol penggunaan alokasi dana pendidikan, dan memantau output sekolah. Dalam mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah, komite turut terlibat dalam rapat perencanaan program kerja lembaga yang dihadiri oleh seluruh anggota keluarga besar lembaga pendidikan. Seperti yang diungkapkan oleh pendapat Satori yang dikutip oleh Sagala, peran serta masyarakat melalui komite meliputi menyusun atau membahas laporan tahunan sekolah yang menggambarkan pelaksanaan perencanaan tahunan sekolah. Laporan tahunan sekolah merupakan dokumen penting yang menjelaskan kondisi kemajuan sekolah. Bentuk laporan tahunan sekolah disesuaikan dengan perencanaan tahunan sekolah, dan aspek-aspek apa saja yang perlu dilaporkan, bagaimana format laporannya, serta siapa atau gugus tugas mana yang melakukannya, perlu ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang pasti, laporan tahunan sekolah sangat bermanfaat bagi sekolah sendiri dan para stakeholder-nya.

Laporan tahunan sekolah merupakan sarana bagi sekolah untuk bertanggung jawab kepada stakeholder, terutama orang tua. Melalui laporan ini, mereka mendapatkan informasi yang jujur, obyektif, dan dapat dipercaya mengenai kinerja sekolah dan hasil belajar murid. Setelah laporan tahunan sekolah dibahas dan disetujui oleh komite sekolah, selanjutnya laporan tersebut disampaikan ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat sebagai bahan untuk melakukan review sekolah. Komite sekolah juga mengontrol proses pengambilan kebijakan oleh kepala sekolah tanpa mengintimidasi keputusan sekolah. Kepala sekolah diberi keleluasaan untuk mengambil kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan melaporkannya kepada komite sekolah. Hal ini sejalan

dengan pendapat M. Misbah yang menyatakan bahwa komite sekolah dapat melakukan fungsi yang sama dengan Dewan Pendidikan dalam mengontrol proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, termasuk kualitas kebijakan yang ada. Selain itu, komite sekolah juga melakukan pengawasan terhadap alokasi anggaran. Setiap alokasi anggaran yang diajukan oleh sekolah didukung oleh komite sekolah karena dianggap sesuai dengan sasaran. Hal tersebut sejalan dengan pendapat M. Misbah yang menyebutkan bahwa fungsi komite sekolah adalah memantau alokasi dana dan sumber daya bagi pelaksanaan program sekolah. Ditjen Dikdasmen Depdiknas juga menegaskan bahwa peran komite sebagai badan pengontrol mencakup memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah. Komite sekolah selaku pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Minimal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan dari satuan pendidikan. Dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Meminta penjelasan sekolah tentang hasil belajar siswa di sekolah
- b. Mencari penyebab ketidak berhasilan belajar siswa, dan memperkuat berbagai hal yang menjadi keberhasilan belajar siswa.
- c. Menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodic, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
- d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan masyarakat baik berupa materi, maupun non materi kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

4. Mediator

Peran mediator Komite Madrasah sangat penting dalam menjalankan tugasnya untuk menghubungkan antara Madrasah dengan orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah. Tujuannya adalah agar komunikasi dan interaksi antara **ketiga** elemen tersebut berjalan dengan baik, sehingga ide, tuntutan, informasi, kritik, saran, dan keluhan dari orang tua peserta didik dan masyarakat dapat tersalurkan dengan baik ke MTs Suryabuana Malang melalui Komite Madrasah. Peran ini membantu dalam memastikan bahwa peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud dengan lancar. Dalam melaksanakan peran sebagai mediator, Komite Madrasah melakukan berbagai aktivitas, seperti menghubungkan sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, dan mediasi dengan instansi-**instansi** lain. Koordinasi dan pertemuan formal dengan orang tua siswa dan masyarakat dilakukan, meskipun tidak secara rutin, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan antara sekolah dan lingkungan sekitarnya.

Pandangan Sagala tentang pentingnya desentralisasi pendidikan untuk memberdayakan orang tua dan M. Misbah yang menyoroti peran komite sekolah sebagai mediator menekankan betapa esensialnya kerjasama antara sekolah dan stakeholders di sekitarnya. Dengan adanya kerjasama yang baik, termasuk melalui peran komite sekolah sebagai penghubung, maka proses pendidikan akan menjadi lebih efektif dan berdaya guna. Orang tua, masyarakat, dan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan akan terlibat aktif dalam mendukung upaya-upaya sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam konteks ini, komite sekolah memiliki peran strategis dalam menjembatani hubungan antara sekolah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan menjadi mediator yang efektif, komite sekolah dapat memfasilitasi dialog yang produktif, menyampaikan aspirasi, serta memastikan bahwa kebijakan-kebijakan sekolah memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat serta standar yang ditetapkan oleh instansi terkait. Sehingga, peran komite sekolah tidak hanya memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sekolah dalam menjalankan tugasnya.

Berbagai persoalan yang sering dialami orangtua dalam pelaksanaan pendidikan anak-anaknya di sekolah misalnya seringkali terbentur pada sebatas keluhan, kurang direspons sekolah. Oleh karena itu, kehadiran komite sekolah pada posisi ini sangat penting dalam mengurangi berbagai keluhan orangtua tersebut. (Misbah, 2009) Selain itu, komite sekolah berperan dalam menampung aspirasi masyarakat, dalam hal ini dapat berupa pengaduan, keluhan maupun saran terhadap kebijakan dalam program pendidikan. Hal ini sebagaimana menurut Kemdiknas bahwa tujuan pembentukan komite sekolah adalah: menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk dapat melahirkan kebijakan dan program pendidikan yang dapat mendorong kemajuan sekolah, mendorong peningkatan

tanggungjawab dan peranserta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, menciptakan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, dan demokratis dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Lebih lanjut (M. Misbah, 2008:68) mengatakan komite sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan lebih kepada upaya memfasilitasi berbagai masukan dari masyarakat terhadap kebijakan dan program pendidikan yang ditetapkan sekolah. Peran ini antara lain dengan mengkomunikasikan berbagai pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah terkait dalam bidang pendidikan Selain itu, komite sekolah juga melakukan mediasi terhadap instansi lain. Instansi disini yang dimaksud adalah alumni, dan kalangan pejabat pemerintah. Tujuan dalam mediasi terhadap alumni dan pemerintah adalah mewujudkan koordinasi yang sehat untuk pengembangan mutu lembaga, baik berupa bentuk saran, solusi dan bantuan anggaran dalam pengembangan sekolah. Hal ini sebagaimana pendapat Hasbullah, pada dasarnya posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan wilayahnya, dan pemerintah daerah di pihak lainnya (Hasbullah,2010).

3. Kontribusi Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan

Komite MTs Suryabuana Malang telah menjalankan perannya dengan baik dan terarah, sehingga hal tersebut menyebabkan adanya kontribusi yang dipersembahkan kepada MTs Suryabuana Malang . Ada beberapa Kontribusi Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan di MTs Suryabuana Malang , diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Salah satu aspek peningkatan mutu pelayanan pendidikan di MTs Suryabuana Malang adalah dengan memenuhi kebutuhan madrasah terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Adanya sarana dan prasarana penunjang pendidikan dibutuhkan agar peserta didik merasa nyaman dan lancar dalam belajar. Oleh karena itu MTs Suryabuana Malang berusaha semaksimal mungkin melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pendidikan demi meningkatkan mutu pendidikan di MTs Suryabuana Malang. Pentingnya sarana dan prasarana dalam menunjang proses pendidikan diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu: setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kewajiban peserta didik.

b. Peningkatan Prestasi Sekolah salah satu aspek peningkatan mutu pelayanan pendidikan di MTs Suryabuana Malang hal disebabkan karna kontribusi dari komite dalam memberi pertimbangan pendukung dan pengontrol dari program-program yang ada di MTs Suryabuana Malang . Karna Tinggi rendahnya suatu mutu pendidikan dapat dilihat dari prestasi siswa didik. Semakin banyak siswa didik yang berprestasi, maka mutu pendidikannya dapat dikatakan baik. Prestasi cenderung didasarkan atas kriteria-kriteria tertentu. Tergantung dari sudut pandang mana individu itu menilai. Kriteria prestasi yang dijadikan sebagai landasan adalah kemampuan siswa dalam membaca, kemampuan menguasai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan matematika (Mustari dan Rahman,2014).

c. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik

Dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya di MTs Suryabuana Malang diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Kurangnya tingkat kesejahteraan yang dimiliki oleh pendidik dapat mempengaruhi kinerjanya sebagai pendidik, seorang pendidik yang kesejahteraannya tidak terpenuhi cenderung tidak fokus bekerja karena memikirkan bagaimana mendapatkan kesejahteraan hidupnya dengan cara lain. Oleh karena itu MTs Suryabuana Malang sangat berusaha meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai-pegawai yang bekerja disana agar pendidik lebih berkonsentrasi dalam mendidik peserta didik.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data diatas tentang Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Melalui Optimalisasi Peran Komite Madrasah dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pembentukan komite madrasah yang ada di MTs Suryabuana Malang Komite Madrasah dibentuk berdasarkan hasil dari musyawarah yang dilaksanakan antara wali murid dengan pihak Madrasah Tsanawiyah . Suryabuana Malang Komite Madrasah Tsanawiyah Suryabuana Malang selalu berperan aktif dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Suryabuana

- Malang. Komite Madrasah Tsanawiyah Suryabuana Malang ini bersifat independen.
2. Komite Madrasah Tsanawiyah Suryabuana Malang sudah menjalankan perannya dengan baik yaitu sebagai pemberi pertimbangan , pendukung, pengontrol dan mediator Keberhasilannya ini diawali dengan dilaksanakan ketiga prinsip manajemen modern, yaitu transparan, akuntabel dan demokratis dalam proses pembentukan Komite Madrasah.
 3. Kontribusi komite MTs Suryabuana Malang dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di MTs Suryabuana Malang yaitu peningkatan sarana dan prasarana , prestasi sekolah dan juga kesejahteraan pendidik. Hal ini tidak terlepas dari adanya kontribusi komite madrasah dalam hal pendanaan .

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Rulam. (2014). Pengantar Pendidikan: asas & Filsafat Pendidikan. Yogyakarta: Ar-. Ruzz.
- Anwar Arifin,(2003) Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undangundang SISDIKNAS, Jakarta: DEPAG RI Dirjen Kelembagaan Agama Islam
- Baharuddin,(2010), Manajemen Pendidikan Islam, UIN Maliki Press, Malang.
- Departemen Pendidikan Nasional.2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Depdiknas, (2006). Pemberdayaan Komite Sekolah: Modul 1 Jakarta: Depdiknas,
- Depdiknas. (2002) . Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah: Konsep dasar. Jakarta: Ditjen Dikdasmen._____. 2007. Pendidikan dan pelatihan: Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. Jakarta: Ditnaga Ditjen PMPTK
- Kepmendiknas No. 044/U/2002, Lampiran I,
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Misbah. Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan, Vol.14 No.I Jan-Apr 2009 68-91, 10
- Mustari, Mohamad dan Rahman, M.T. (2014) Nilai Karakter refleksi untuk pendidikan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Raberi, Ariyadi, Happy Fitria, and Yessi Fitriani. Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah Dan Peran Komite Sekolah Terhadap Kinerja Guru. (2020).JurnalAl-Qiyam1,no.2: 11-20
- Rohiat, (2010). Manajemen Sekolah. Bandung. Refika Aditama
- Sagala Syaiful. (2008). Administrasi Pendidikan Kontemporer. Bandung: CV. Alfabeta,
- Samsidar, Dra. Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (2018). Al-Muaddib :JurnalIlmu-Ilmu Sosial & Keislaman3, no. 1 :1–15. <http://dx.doi.org/10.31604/muaddib.v1i1.364>
- Sri Renani Pantjastuti dkk. (2008). Komite Sekolah; Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan, Yogyakarta: Hikayat
- Tim Pengembangan Komite Sekolah Ditjen Dikdasmen Depdiknas,Indikator Kinerja Komite Sekolah, dalam <http://dpjp.wordpress.com/2007/04/28/indikator-kinerja-komite-sekolah/>.